

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan.
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan perlindungan dan KSDAE.
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan DAS dan RHL.
6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis.
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Penghijauan Lingkungan Melalui Revolusi Hijau | Persentase hutan dan lahan kritis yang ditanami | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan banyaknya penanaman pada hutan dan lahan kritis diharapkan pada tiga sampai lima tahun kedepan akan mampu mengurangi luasa hutan dan lahan kritis yang ada atau minimal menurunkan status kritisnya menjadi agak kritis, dengan berkurangnya lahan kritis di Provinsi Kalsel diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalsel dan mengurangi resiko bencana yang disebabkan oleh lahan kritis.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 640.708,70</p> | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan | Bidang Pengelolaan DAS dan RHL |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | <p>Persentase panjang jalan A. Yani yang teduh dengan penanaman pohon besar pada kiri kanan jalan</p> | <p>Hektar (Hasil Review Tahun 2013, BPDAS Barito). Yang mencapai 36 % dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 1.779.982 Ha. Hal ini bila tidak ditangani dengan serius maka luas lahan kritis dapat bertambah dengan cepat sebelum kita sadari.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi luas penanaman pada hutan dan lahan kritis dibagi jumlah luas lahan kritis X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan penanaman pohon besar pada kiri kanan jalan di sepanjang jalan A. Yani diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan disepanjang Jl. A. Yani sebagai jalan protokol.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Tanaman besar di kiri dan kanan jalan akan mampu berfungsi sebagai penyerap polusi dari kendaraan bermotor dan meningkatkan nilai kualitas lingkungan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah panjang jalan yang tertanami tanaman peneduh dibagi dengan target rencana panjang jalan yang akan ditanami selama lima tahun X 100%</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang Pengelolaan DAS dan RHL</p> |
|--|--|---|--|--|---|

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| | | <p>Persentase penambahan tanaman untuk mendukung tutupan lahan</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan penanaman atau rehabilitasi pada kawasan hutan dan DAS diharapkan mampu berkontribusi pada tutupan lahan yang diperlukan untuk peningkatan indeks kualitas lingkungan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Tutupan lahan yang diperlukan saat ini adalah sebesar 51.000 Ha, dengan bertambahnya tutupan lahan maka akan mampu meningkatkan tangkapan air hujan yang mengurangi arus permukaan dan mengurangi resiko banjir serta tanah longsor yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi luas penanaman pohon dibagi jumlah luas tutupan lahan yang diperlukan X 100 %</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang Pengelolaan DAS dan RHL</p> |
| <p>2.</p> | <p>Meningkatnya Kemantapan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari</p> | <p>Persentase kawasan hutan yang terkelola pada tingkat tapak.</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Pengelolaan kawasan hutan akan lebih mantap pelaksanaannya bila status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan desainnya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan berkeadilan dapat dilakukan terlebih dahulu. Dimana dengan adanya kepastian status, letak, luas dan batas hutan dalam unit-unit tertentu maka dapat diwujudkanlah pengelolaan kawasan hutan yang optimal dan lestari.</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang PPPH</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--------------|
| 3. | Meningkatnya peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan | Persentase penambahan izin HTR, HD dan HKM (perhutanan sosial) | <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kawasan hutan di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa daerah dengan kearifan lokal yang juga berbeda, dengan adanya unit-unit pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun lindung diharapkan pengelolaan hutan lebih dapat terpola dengan optimal dengan dukungan kearifan lokal setempat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah luas kawasan hutan yang terkelola ditingkat tapak dibagi jumlah kawasan hutan keseluruhan X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam bentuk perhutanan sosial maka kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena masyarakat dapat ikut memanfaatkan hasil hutan secara legal.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan kehutanan mutlak diperlukan sebagai salah satu faktor pendukung utama kegiatan, dan diharapkan dapat memunculkan rasa memiliki dan perhatian lebih terhadap kelestarian hutan oleh masyarakat .</p> | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan | Bidang PMPPS |
|----|--|--|---|---|--------------|

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | <p>Persentase kelas kelompok tani hutan yang mengalami peningkatan kelas</p> | <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah HTR, HD dan HKM yang mendapatkan izin dibagi jumlah total HTR, HD dan HKM yang ada X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Kelompok tani hutan adalah ujung tombak pelaksana pembangunan kehutanan, selain dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan mereka juga mempunyai kemampuan dan kesadaran dalam melestarikan kawasan hutan. Dengan meningkatnya kelas kelompok tani hutan diharapkan pelaksanaan pembangunan kehutanan akan dapat secara optimal dilaksanakan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Semakin tingginya tingkat kemampuan individu pada kelompok tani hutan, akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kelompok tani hutan yang ditargetkan untuk peningkatan kelas dibagi dengan jumlah kelompok tani hutan seluruhnya X 100%</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang PMPPS</p> |
| 4. | Menurunnya gangguan keamanan hutan dan sumber daya hutan | Prosentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan menurunkan kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan di Provinsi Kalsel diharapkan dapat mengurangi lajunya degradasi kawasan</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang Perlindungan dan KSDAE</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| | | <p>Prosentase penurunan kasus kebakaran hutan</p> | <p>hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Laju degradasi kawasan hutan saat ini yang disebabkan oleh penebangan dan perambahan liar sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat fatal bagi lingkungan hidup secara keseluruhan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kasus gangguan kemanan hutan yang terjadi pada Tahun 2017 dibanding dengan jumlah kasus gangguan kemanan hutan yang terjadi.pada awal periode RPJMD X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan menurunkan kasus kebakaran hutan di Provinsi Kalsel diharapkan dapat mengurangi lajunya degradasi kawasan hutan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kebakaran hutan selain menyebabkan kerusakan hutan pada skala yang masif juga sangat mempengaruhi pada gangguan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan, jika tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan bencana yang berskala nasional.</p> | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan</p> | <p>Bidang Perlindungan dan KSDAE</p> |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kasus kebakaran hutan yang terjadi pada Tahun 2017 dibanding dengan jumlah kasus kebakaran hutan yang terjadi.pada awal periode RPJMD X 100% | | |
|--|--|--|---|--|--|

Banjarbaru, Januari 2017

Kepala Dinas,



DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP

Pembina TK I

NIP. 19710321 199302 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS III TAHUN 2017
SEKRETARIAT DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Tercapainya Perencanaan dan Pelaporan Yang Berkualitas | Mempertahankan grade SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan mempertahankan grade SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, maka secara tidak langsung akan mendukung pencapaian SAKIP Pemerintah Provinsi Kalsel.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel saat ini mendapatkan grade nilai "BB" dengan predikat sangat baik yang patut untuk dipertahankan bahkan untuk ditingkatkan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel</p> | Sekretaris | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan |
| 2. | Tercapainya pengelolaan keuangan dan asset | Persentase penyerapan anggaran | <p><u>Makna Indikator :</u> Persentase penyerapan anggaran yang tinggi menggambarkan suatu desain perencanaan yang baik.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan terserapnya anggaran secara maksimal maka target-target yang telah ditetapkan untuk dibiayai pun dapat tercapai secara optimal.</p> | Sekretaris | Kasubag Keuangan dan Asset |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | <p>Persentase asset yang tercatat</p> | <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah realisasi anggaran dibagi dengan rencana anggaran X 100%</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Persentase asset yang tercatat yang tinggi menggambarkan bahwa asset yang ada telah ditangani dengan baik.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Asset sebagai barang milik daerah atau negara merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh setiap organisasi perangkat daerah, dengan pencatatan aset yang baik maka keberadaan dan kondisi suatu asset dapat diketahui, serta kebutuhan akan asset dapat direncanakan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah asset yang dicatat dibagi jumlah asset seluruhnya X 100%</p> | <p>Sekretaris</p> | <p>Kasubag Keuangan dan Asset</p> |
| <p>3.</p> | <p>Tercapainya Pelayanan ASN dan Perkantoran</p> | <p>Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian adalah merupakan hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemenuhan hak pegawai setelah mereka menjalankan kewajiban mereka selaku pegawai.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dapat membantu meningkatkan kinerja para pegawai.</p> | <p>Sekretaris</p> | <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|
| | | <p>Persentase pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan</p> | <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah pegawai yang diurus kepegawaiannya dibagi jumlah pegawai yang mengajukan urusan kepegawaian X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan adalah merupakan hal yang penting sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dapat membantu meningkatkan kinerja para pegawai.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan X 100%</p> | <p>Sekretaris</p> | <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|

Banjarbaru, Maret 2017

SEKRETARIS,



DR. RAHMADDIN MY, A. Ks, M. Si
 NIP. 19740310 199903 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS III TAHUN 2017
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL**


| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|------------------|---|
| 1. | Tercapainya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Penghijauan | Persentase penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan selesainya target penanaman yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mengurangi lahan kritis Prov. Kalsel pada tiga sampai lima tahun mendatang</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 640.708,70 Hektar (Hasil Review Tahun 2013, BPDAS Barito). Yang mencapai 36 % dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 1.779.982 Ha. Hal ini bila tidak ditangani dengan serius maka luas lahan kritis dapat bertambah dengan cepat sebelum kita sadari.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi penanaman dibagi jumlah target penanaman X 100%</p> | Kabid PDASRHL | Kasi RHL dan Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan |
| | | Persentase penanaman dalam rangka penghijauan lingkungan | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan selesainya target penanaman yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mendukung kualitas lingkungan hidup.</p> | Kabid PDASRHL | Kasi RHL dan Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---------------|--|
| 2. | Tercapainya Pengelolaan DAS | Persentase penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS | <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kondisi lingkungan yang nyaman dan berkualitas dapat diindikasikan dengan banyak pepohonan hijau yang tumbuh. Pohon berguna untuk memberikan pasokan oksigen kepada manusia serta mengurangi karbon dioksida yang ada pada udara</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi penanaman dalam rangka penghijauan dibagi jumlah rencana penanaman X 100</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan terlaksananya Rehabilitasi DAS diharapkan mampu untuk memperbaiki tutupan lahan DAS dan meningkatkan fungsi DAS bagi lingkungan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kondisi DAS yang bagus akan mampu meningkatkan tangkapan air hujan yang mengurangi arus permukaan dan mengurangi resiko banjir serta tanah longsor yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi rehab DAS dibagi jumlah rencana rehab DAS X 100%</p> | Kabid PDASRHL | Kasi Pengelolaan DAS |
| 3. | Tercapainya Pengembangan Perbenihan dan Hutan Tanaman | Persentase penanaman pada Hutan Tanaman | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan terlaksananya penanaman di Hutan Tanaman selain dapat memberikan dampak pada perbaikan</p> | Kabid PDASRHL | Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|
| | | <p>Persentase penyediaan benih/bibit penghijauan lingkungan.</p> | <p>lingkungan juga dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Hutan tanaman sebagai salah satu mitra pembangunan kehutanan perlu didukung dengan fasilitasi dan pembinaan sehingga dapat beroperasi dan berproduksi sesuai dengan yang diinginkan, terutama dalam hal penanaman sehingga dapat optimal.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi penanaman Hutan Tanaman dibagi jumlah rencana penanaman Hutan Tanaman X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Kegiatan penghijauan memerlukan ketersediaan bibit sebagai faktor utama dalam kegiatan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Penyediaan benih/bibit tanaman mutlak diperlukan, karena tanpa benih/bibit tidak akan ada pohon yang ditanam, dan tidak adanya pohon yang ditanam maka tidak akan ada perbaikan kualitas terhadap lingkungan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah realisasi penyediaan benih/bibit dibagi jumlah rencana penyediaan benih/bibit X 100%</p> | <p>Kabid PDASRHL</p> | <p>Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan</p> |
|--|--|--|--|----------------------|---|

Banjarbaru, Maret 2017

Kepala Bidang PDASRHL,


Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP
NIP. 19680519 199903 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS III TAHUN 2017
 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYULUHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|------------------|---------------------------------------|
| 1. | Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan | Persentase kelompok tani yang difasilitasi dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan guna peningkatan kesejahteraan | <p><u>Makna Indikator :</u> Kelompok tani hutan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan yang harus difasilitasi dan dipercaya guna mencapai pembangunan kehutanan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai bentuk diversifikasi pemanfaatan hasil hutan akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani hutan yang juga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan & difasilitasi dibagi jumlah kelompok tani hutan keseluruhan X 100 %</p> | Kabid PMPPS | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 2. | Tercapainya Pengembangan Perhutanan Sosial | Persentase kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial maka dapat berdampak langsung pada peningkatan</p> | Kabid PMPPS | Kasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|---------------------------|
| 3. | Tercapainya Penyuluhan Kehutanan Yang Optimal | Persentase kelompok tani hutan yang dibina penyuluh kehutanan | <p>kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan kehutanan mutlak diperlukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, fasilitasi untuk mendapatkan izin merupakan langkah awal dari pelibatan dalam kegiatan yang dapat didukung oleh pemerintah.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah perhutanan sosial yang difasilitasi dibagi jumlah perhutanan sosial yang ada X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Penyuluh kehutanan salah tugasnya adalah membina kelompok tani hutan yang ada di wilayah kerjanya, dengan pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kelompok tani hutan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan yang harus terus mendapat pembinaan untuk meningkatkan kualitas mereka, sehingga kegiatan pembangunan kehutanan yang dipercayakan pada kelompok tani dapat berhasil secara optimal.</p> | Kabid PMPPS | Kasi Penyuluhan Kehutanan |
|----|---|---|---|-------------|---------------------------|

Banjarbaru, Maret 2017

Kepala Bidang PMPPS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Sitti Maskanah'.

Ir. Hj. SITTI MASKANAH, MP

NIP. 19640813 199003 2 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS III TAHUN 2017
 BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|------------------|--|
| 1. | Tercapainya Pembentukan Pengelolaan Kawasan Hutan | Persentase pembentukan KPH sebagai UPTD Pengelola Kawasan Hutan | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan terbentuknya KPH sesuai yang direncanakan maka target pengelolaan kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dapat dilaksanakan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Kawasan hutan di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa daerah dengan kearifan lokal yang juga berbeda, dengan adanya unit-unit pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun lindung diharapkan pengelolaan hutan lebih dapat terpola dengan optimal dengan dukungan kearifan lokal setempat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah realisasi pembentukan KPH dibagi jumlah rencana pembentukan KPH di draft Pergub X 100%</p> | Kabid PPH | Kasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan |
| 2. | Tercapainya Pemantapan Kawasan Hutan | Persentase batas kawasan hutan lindung dan konservasi yang terpelihara | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan terpeliharanya batas kawasan hutan maka status fungsi kawasan hutan lindung dan konservasi dilapangan secara visual dapat diketahui oleh semua pihak yang akan bersentuhan dengan kawasan hutan.</p> | Kabid PPH | Kasi dan Pengukuhan Penggunaan Hutan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----------|-------------------------------------|
| 3. | Tercapainya Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan | Persentase IUPHHK HA dan IPHHK yang aktif beroperasi | <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kejelasan batas kawasan hutan lindung dan konservasi akan berdampak pada kejelasan status fungsi suatu kawasan sebagai hutan lindung dan konservasi guna menghindari konflik karena pemanfaatan hutan yang tidak sesuai.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah batas kawasan hutan lindung dan konservasi yang dipelihara dibagi Jumlah batas kawasan hutan lindung dan konservasi keseluruhan X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Aktifnya IUPHHK HA dan IPHHK akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja yang mampu mendukung pergerakan ekonomi ditengah-tengah masyarakat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> IUPHHK HA dan IPHHK yang ada di Kalimantan Selatan saat ini jumlahnya sudah sangat berkurang, namun mengingat vitalnya keberadaan IUPHHK HA dan IPHHK dalam menunjang penyerapan tenaga kerja maka keberadaannya perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan baik secara jumlah unit maupun jumlah produksinya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah IUPHHK HA dan IPHHK yang aktif beroperasi dibagi jumlah IUPHHK</p> | Kabid PPH | Kasi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP |
|----|---|--|---|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Jumlah produk hasil hutan Kalsel yang dipromosikan | <p>HA dan IPHHK yang ada di Provinsi Kalsel X 100%</p> <p><u>Makna indikator :</u> Produk hasil hutan di Kalimantan Selatan cukup banyak ragam dan jenisnya yang dapat dijual ke luar daerah guna peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Provinsi Kalsel.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Diperlukan promosi yang masif dan berkelanjutan untuk mengenalkan produk-produk hasil Kalsel terutama produk-produk hasil hutan bukan kayu.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah jenis hasil hutan Kalsel yang dipromosikan</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kepala Bidang PPH,



L. BUDI WIBOWO, S.Hut, MP

NIP. 19670712 199603 1 004

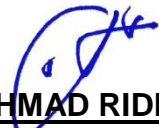
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS III TAHUN 2017
 BIDANG PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|------------------|---|
| 1. | Tercapainya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Serta Hasil Hutan | Prosentase selesainya kasus illegal logging dan perambahan kawasan | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan selesainya kasus illegal logging dan perambahan kawasan di Kalsel diharapkan dapat mengurangi lajunya kerusakan hutan di wilayah Prov. Kalsel</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Masih terjadinya illegal logging dan perambahan kawasan, bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat kerusakan terhadap kawasan hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah kasus illegal logging dan perambahan kawasan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus illegal logging dan perambahan kawasan yang terjadi pada Tahun 2017 X 100%</p> | Kabid PKSDAE | Kasi Pengamanan Hutan |
| 2. | Tercapainya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Prosentase selesainya kasus kebakaran hutan di Kalsel | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan dilakukannya kegiatan pemadaman terhadap setiap kejadian kebakaran hutan diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan akibat kebakaran</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Kebakaran hutan selain menyebabkan kerusakan hutan pada skala yang masif</p> | Kabid PKSDAE | Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|---------------------------|
| 3. | Tercapaiannya Konservasi Sumber Daya Hutan | Persentase fauna endemik Kalsel yang dikonservasi | <p>juga sangat mempengaruhi pada gangguan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan, jika tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan bencana yang berskala nasional.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kasus kebakaran hutan yang ditindak dibagi jumlah kasus kebakaran hutan yang terjadi pada Tahun 2017 X 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan dilakukannya konservasi terhadap fauna endemik Kalsel diharapkan dapat menjaga kelestarian fauna endemik Kalsel.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Fauna endemik Kalsel perlu dilestarikan dengan tujuan agar Kalsel tidak kehilangan fauna endemiknya dan sebagai warisan untuk anak cucu dimasa yang akan datang.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah fauna endemik yang dikonservasi dibagi jumlah fauna endemik Kalsel yang ada X 100 %</p> | Kabid PKSDAE | Kasi SDAE Konservasi |
|----|--|---|---|--------------|---------------------------|

Banjarbaru, Maret 2017

Kepala Bidang PKSDAE,


Ir. H. AKHMAD RIDHANI, MP
NIP. 19601007 198903 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN PERBENIHAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|--|--|
| 1. | Mengembangkan Usaha Hutan Tanaman dan Perbenihan | <p>Jumlah IUPHHK-HT yg aktif beroperasi dan memproduksi guna penyerapan tenaga kerja & mendukung pembangunan bidang kehutanan</p> <p>Jumlah penyediaan bibit tanaman untuk penghijauan dan bantuan kepada masyarakat</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : IUPHHK HT yang ada di Kalimantan Selatan saat ini jumlahnya sudah sangat berkurang, namun mengingat vitalnya keberadaan IUPHHK HT dalam menunjang penyerapan tenaga kerja maka perlu untuk difasilitasi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan aktifnya beroperasi dan memproduksi IUPHHK-HT akan mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Kalsel.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah IUPHHK-HT yang aktif beroperasi dan memproduksi</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Dalam rangka menggalakan penghijauan di Provinsi Kalsel untuk perbaikan kualitas lingkungan diperlukan kesediaan bibit siap tanam.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan tersedianya bibit siap tanam maka kegiatan penghijauan dapat dilaksanakan kapanpun diperlukan.</p> | Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan | Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah bibit yang disediakan untuk penghijauan dan bantuan masyarakat. | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pengembangan Hutan Tanaman
dan Perbenihan,



MUSTAMIN, S. Hut

NIP. 19750415 199603 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGELOLAAN DAS

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Mewujudkan Pengelolaan DAS | <p>Jumlah peta kerja dan peta hasil Identifikasi Lahan kritis guna Rehab DAS oleh IPPKH</p> <p>Jumlah IPPKH yang melaksanakan rehab DAS</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Peta kerja diperlukan untuk perencanaan kegiatan dan peta hasil diperlukan untuk melihat hasil pelaksanaan kegiatan rehab DAS oleh IPPKH.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan tersedianya peta kerja dan peta hasil maka dapat diketahui progres serta kesesuaian antara rencana dan realisasi Rehab DAS.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah peta kerja dan hasil yang dibuat</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Pemegang izin IPPKH berkewajiban untuk melaksanakan rehab DAS sebagai ganti rugi tegakan yang rusak diakibatkan eksplorasi para pemegang izin.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Tutupan lahan di DAS akan mampu meningkatkan tangkapan air hujan yang mengurangi arus permukaan dan mengurangi resiko banjir serta tanah longsor yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan.</p> | Kasi Pengelolaan DAS | Kasi Pengelolaan DAS |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah pemegang izin IPPKH yang melaksanakan rehab DAS | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pengelolaan DAS,



ALIP WINARTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19700615 199803 1 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|-------------|
| 1. | Mewujudkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | <p>Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>Jumlah bibit tanaman yang terdistribusi</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Pengadaan bibit tanaman merupakan komponen utama dari terlaksananya kegiatan penanaman.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Ketersediaan bibit yang baik dan sesuai jadwal akan menjadikan kegiatan penanaman bisa dilaksanakan secara optimal.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah pengadaan bibit tanaman</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Bibit tanaman yang telah tersedia perlu didistribusikan sesuai dengan target per wilayah aksi penanaman.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan cepat dan tertibnya distribusi bibit maka kegiatan penanaman bisa dilaksanakan secara optimal.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah bibit tanaman yang didistribusikan</p> | Kasi RHL | Kasi RHL |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Jumlah kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam penanaman</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Kegiatan penanaman akan melibatkan peran aktif kelompok masyarakat setempat, dan jenis tanaman yang ditanam selain jenis kehutanan juga mengakomodir jenis tanaman tertentu yang diinginkan oleh masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Keberhasilan penanaman di daerah kawasan hutan sangat memerlukan dukungan dari masyarakat setempat, tanpa dukungan masyarakat setempat tingkat kegagalan kegiatan akan meningkat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah kelompok masyarakat yang dilibatkan</p> | | |
| | | <p>Jumlah panjang jalan A. Yani yang menjadi teduh karena penanaman</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan penanaman pohon besar pada kiri kanan jalan di sepanjang jalan A. Yani diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan disepanjang Jl. A. Yani sebagai jalan protokol.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Tanaman besar di kiri dan kanan jalan akan mampu berfungsi sebagai penyerap polusi dari kendaraan bermotor dan meningkatkan nilai kualitas lingkungan</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>Jumlah panjang jalur utama kawasan perkantoran Pemprov yang ditanami untuk penghijauan kanan kiri jalan</p> | <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah panjang jalan A. Yani yang ditanami</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan penanaman pohon pada jalur utama kawasan perkantoran Pemprov diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan perkantoran Pemprov.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Tanaman di kiri dan kanan jalan akan mampu berfungsi sebagai penyerap polusi sekaligus keindahan guna meningkatkan nilai kualitas lingkungan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah panjang jalur utama kawasan perkantoran Pemprov yang ditanami</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi RHL,

RINI HARTATI, S.Hut, MP
NIP. 19780609 199803 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

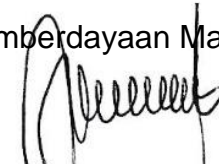
| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan | Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami Gaharu Jumlah rancangan teknis penanaman Gaharu | <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan pengembangan hasil hutan gaharu diharapkan dapat menjadi sarana pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan positif yang dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Pengembangan gaharu sebagai bentuk diversifikasi pemanfaatan hasil hutan perlu lebih dikembangkan untuk mendorong masyarakat sekitar hutan mengurangi ketergantungan akan produksi hasil hutan kayu sebagai sumber mata pencahariannya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah luas penanaman gaharu</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan diperlukan rancangan teknis yg berguna sebagai ukuran-ukuran standar tertentu yang harus dicapai.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Tanpa adanya rancangan teknis, akan terjadi kesulitan dalam mengukur keberhasilan kegiatan.</p> | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah petani hutan yang mengikuti pelatihan budidaya HHBK guna optimalnya pengembangan HHBK oleh masyarakat</p> <p>Jumlah koloni lebah madu yang dapat dimanfaatkan petani</p> | <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah rancangan teknis yang disusun</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Petani tani hutan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan yang harus difasilitasi dan dipercaya guna mencapai pembangunan kehutanan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai bentuk diversifikasi pemanfaatan hasil hutan akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh petani tani hutan yang juga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah petani tani hutan yang mengikuti pelatihan</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan pengembangan lebah madu diharapkan dapat menjadi sarana pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan positif yang dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Pengembangan lebah madu sebagai bentuk diversifikasi pemanfaatan hasil hutan perlu lebih dikembangkan untuk</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>mendorong masyarakat sekitar hutan mengurangi ketergantungan akan produksi hasil hutan kayu sebagai sumber mata pencahariannya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah koloni lebah madu yang diberikan pada petani</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pemberdayaan Masyarakat,



AINUN JARIAH, S. Hut
NIP. 19700127 199603 2 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan guna pemahaman dalam pengelolaan HKM dan HD | <p><u>Makna Indikator :</u> Perhutanan sosial (HTR, HR, HKM atau HD) bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan fasilitas pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadikan sistem perhutanan sosial sebagai suatu bentuk pengelolaan yang bersifat profesional yang menghasilkan sekaligus menjaga kelestarian.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan</p> | Kasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat | Kasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat |

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,


MISRIAH, S. Hut

NIP. 19770927 200604 2 023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENYULUHAN KEHUTANAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan | <p>Jumlah penyuluh kehutanan yang berperan serta aktif dalam membina masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan</p> <p>Jumlah Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi yang dapat dimanfaatkan</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Penyuluh kehutanan merupakan ujung tombak penyampaian kebijakan pembangunan kehutanan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan terfasilitasinya penyuluh kehutanan diharapkan kinerja dari para penyuluh kehutanan dapat bekerja secara optimal dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah penyuluh kehutanan yang dibina dan difasilitasi</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Penyuluhan kehutanan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan guna mencegah kerusakan hutan sekaligus dapat merangkul masyarakat di sekitar hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan dibuatnya program penyuluhan kehutanan Tingkat Provinsi bagi para penyuluh kehutanan maka kegiatan penyuluhan dapat secara</p> | Kasi Penyuluhan Kehutanan | Kasi Penyuluhan Kehutanan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah Programa Penyuluhan Kehutanan di Tingkat KPH yang dapat dimanfaatkan</p> <p>Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM</p> | <p>optimal dilakukan dengan tujuan kelestarian kawasan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah programa penyuluh kehutanan tingkat provinsi yang dibuat</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Penyuluhan kehutanan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan guna mencegah kerusakan hutan sekaligus dapat merangkul masyarakat di sekitar hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan dibuatnya programa penyuluhan kehutanan di Tingkat KPH bagi para penyuluh kehutanan maka kegiatan penyuluhan dapat secara optimal dilakukan karena sesuai dengan karakter dan kearifan lokal setempat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah programa penyuluh kehutanan tingkat KPH yang dibuat</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Penyuluh kehutanan merupakan ujung tombak penyampaian kebijakan pembangunan kehutanan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>Jumlah PKSM yang mendapat sertifikat peningkatan kapasitas SDM PKSM</p> | <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan mutlak diperlukan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul terkait permasalahan dengan para binaan mereka.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti pelatihan</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM PKSM diharapkan para PKSM dapat menjadi acuan dari para petani yang mereka bina.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Peningkatan kapasitas SDM PKSM mutlak diperlukan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul terkait permasalahan dengan para binaan mereka.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah PKSM yang mendapat sertifikat peningkatan kapasitas SDM PKSM</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017
Kasi Penyuluhan Kehutanan,


HIDAYATURRAHMAN, S. Hut, MP
NIP. 19701020 199903 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PNBP

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Pengawasan Terhadap Pengolahan, Pemasaran dan PNBP | <p>Jumlah lokasi promosi hasil hutan guna mengenalkan produk hasil hutan Kalsel</p> <p>Jumlah IPHHK yang dibina dan didorong untuk aktif beroperasi dan berproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> | <p><u>Makna indikator :</u> Produk hasil hutan di Kalimantan Selatan cukup banyak ragam dan jenisnya yang dapat dijual ke luar daerah guna peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Provinsi Kalsel.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Diperlukan promosi yang masif dan berkelanjutan untuk mengenalkan produk-produk hasil Kalsel terutama produk-produk hasil hutan bukan kayu.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah lokasi promosi hasil hutan</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Aktifnya IPHHK akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja yang mampu mendukung pergerakan ekonomi ditengah-tengah masyarakat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> IPHHK yang ada di Kalimantan Selatan saat ini jumlahnya sudah sangat berkurang, namun mengingat vitalnya keberadaan IPHHK dalam menunjang</p> | Kasi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP | Kasi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah lokasi yang diperiksa terkait keabsyahan laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan</p> <p>Jumlah rekonsiliasi penerimaan PSDH dan DR Kalsel</p> | <p>penyerapan tenaga kerja maka keberadaannya perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan baik secara jumlah unit maupun jumlah produksinya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah IPHHK yang dibina</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan merupakan kewajiban bagi para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan terpenuhinya keabsyahan laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan diharapkan kebocoran iuran dapat dihindari.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah lokasi yang diperiksa</p> <p><u>Makna Indikator :</u> PSDH dan DR sebagai hak negara atas hutan dan hasil hutan perlu dijaga dan diperhatikan penerimaannya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan terpenuhinya kewajiban dalam pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan berupa PSDH dan DR yang nantinya akan dialokasikan sebagian ke Provinsi Kalsel, diharapkan dapat membantu terlaksananya kegiatan</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | pembangunan daerah yang memerlukan dana penunjang dalam pelaksanaannya. <u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP,



WARBITA, S. Hut, MP
NIP. 19671025 199703 1 001

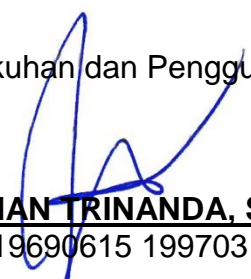
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGUKUHAN DAN PENGGUNAAN HUTAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Jumlah batas kawasan hutan yang terpelihara guna kejelasan tanda batas kawasan | <p><u>Makna Indikator :</u> Batas kawasan hutan adalah penanda yang menunjukkan status hukum terhadap suatu areal hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana keberadaan penanda batas ini sangatlah penting sebagai petunjuk bagi siapa pun mengenai areal mana yang kawasan hutan atau bukan kawasan hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pemeliharaan batas sangat diperlukan terutama untuk mengganti patok-patok batas kawasan hutan yang sudah hilang atau rusak baik itu disebabkan oleh faktor alami maupun faktor kesengajaan manusia yang tidak bertanggung jawab</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Panjang batas kawasan hutan yang dipelihara</p> | Kasi Pengukuhan dan Penggunaan Hutan | Kasi Pengukuhan dan Penggunaan Hutan |
| | | Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang batas kawasan hutan melalui sosialisasi | <p><u>Makna Indikator :</u> Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang batas kawasan</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>hutan akan memahami tentang apa dan bagaimana batas-batas kawasan hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan pemahaman yang memadai oleh masyarakat, diharapkan bisa mengurangi potensi konflik kawasan dengan masyarakat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pengukuhan dan Penggunaan Hutan,


FIRMAN TRINANDA, S.Hut
NIP. 19690615 199703 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN HUTAN**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|--|--|
| 1. | Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Guna Pemanfaatan dan Tata Hutan | <p>Jumlah lokasi kawasan hutan yang teridentifikasi terkait pemanfaatannya</p> <p>Jumlah draft Pergub pembentukan KPH yang disusun dan dimanfaatkan menjadi Pergub</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Tidak hanya potensi kayu yang bisa dimanfaatkan di dalam Kawasan hutan, karena kawasan hutan juga memiliki banyak potensi lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Selain kegiatan kehutanan yang dilakukan di dalam kawasan hutan, ada juga kegiatan-kegiatan non kehutanan yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang perlu diidentifikasi terkait legalitas dan kontribusinya terhadap kehutanan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah lokasi kawasan yang diidentifikasi pemanfaatannya</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Draft Pergub pembentukan KPH diperlukan sebagai dasar pembentukan KPH guna pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak secara lestari.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kawasan hutan di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa daerah dengan kearifan lokal yang juga berbeda,</p> | Kasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan | Kasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | Jumlah lokasi IUPHHK dan IPPHK yg termonitor dan terevaluasi | <p>dengan adanya unit-unit pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun lindung diharapkan pengelolaan hutan lebih dapat terpola dengan optimal dengan dukungan kearifan lokal setempat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah draft Pergub yang dibuat</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan memonitor dan mengevaluasi IUPHHK dan IPPHK dapat diketahui permasalahan yang terjadi serta langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjaga IUPHHK dan IPPHK tetap dalam koridor peraturan dalam pelaksanaan kegiatannya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah IUPHHK dan IPPHK yang di monev</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan,

DR. BENI RAHARJO, S.Hut
NIP. 19780512 199803 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Mewujudkan Konservasi Terhadap Sumber Daya Hutan | Jumlah spesies yang dikonservasi untuk kelestarian flora dan fauna | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan dilaksanakannya konservasi terhadap flora dan fauna diharapkan mampu menjaga kelestarian terhadap flora dan fauna.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Bekantan dna rusa sambar sebagai maskot Provinsi Kalsel saat ini sedang berada dalam ancaman yang serius terutama terkait lingkungan hidupnya yang mulai berkurang.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah spesies yang dikonservasi</p> | Kasi Konservasi SDAE | Kasi Konservasi SDAE |

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Konservasi SDAE,



RUDIONO HERLAMBAANG, S.Hut, MM

NIP. 19701005 199403 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan | <p>Jumlah kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) yg dibina guna kesadaran dan kepeduliannya terhadap kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Jumlah pemantauan titik api hasil data satelit guna deteksi dini kebakaran hutan dan lahan</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : MPA (Masyarakat Peduli Api) merupakan salah satu ujung tombak yang diandalkan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran selain Manggala Agni dan Brigdalkarhutla.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api) diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk mengurangi kasus kebakaran hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) yg dibina</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Pemantauan titik api hasil data satelit merupakan langkah awal yang dapat diambil guna mencegah kebakaran hutan dan lahan dalam skala.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Keberadaan titik api perlu dipantau guna deteksi dini kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah karena keterlambatan informasi.</p> | Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan | Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel yg dibuat & dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan</p> <p>Jumlah peta hotspot Kab/Kota yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan</p> | <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah pemantauan titik api hasil data satelit</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel perlu dibuat untuk mengetahui posisi daerah-daerah yg tingkat kerawanan kebakarannya tinggi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan adanya peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel, dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel yg dibuat</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Peta hotspot Kab/Kota perlu dibuat untuk mengetahui posisi daerah-daerah yg banyak titik apinya per Kabupaten.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan adanya peta hotspot Kab/Kota, dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan per Kabupaten secara detail</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah peta hotspot Kab/Kota yg dibuat</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah peta sebaran hotspot se Provinsi Kalsel yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan se Provinsi Kalsel</p> <p>Jumlah patroli guna pencegahan kebakaran hutan</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Peta sebaran hotspot se Provinsi Kalsel perlu dibuat untuk mengetahui posisi daerah-daerah yg banyak titik api nya dalam lingkup satu Provinsi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan adanya peta hotspot se Provinsi Kalsel, dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana aksi pencegahan & pengendalian kebakaran hutan secara keseluruhan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah peta sebaran hotspot se Provinsi Kalsel yg dibuat</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan dilaksanakannya tindakan preventif dalam pengendalian kebakaran hutan diharapkan dapat mengurangi lajunya kerusakan hutan akibat kebakaran</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Masih terjadinya kebakaran hutan yang bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat kerusakan terhadap kawasan hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah patroli guna pencegahan kebakaran hutan</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017
Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan,



M. HARIYADI, S. Sos, MH
NIP. 19791031 199903 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KASI PENGAMANAN HUTAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Mewujudkan Pengamanan Kawasan Hutan Provinsi Kalsel | <p>Jumlah senjata api yang dipelihara guna keperluan pengamanan hutan</p> <p>Jumlah patroli Pamhut guna mencegah gangguan keamanan hutan</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : Senjata api adalah sarpras pendukung pengamanan hutan yang setiap saat harus siap digunakan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Senjata api yang dalam kondisi baik sangat diperlukan pada setiap aktifitas pengamanan hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah senjata api yang dipelihara</p> <p><u>Makna Indikator</u> : Dengan dilaksanakannya tindakan preventif berupa patroli dalam pengamanan hutan diharapkan dapat mengurangi gangguan keamanan hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Masih terjadinya gangguan keamanan di Provinsi Kalsel yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah patroli Pamhut</p> | Kasi Pengamanan Hutan | Kasi Pengamanan Hutan |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Jumlah operasi pengamanan hutan guna penegakan hukum</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Dengan dilaksanakannya tindakan represif berupa operasi dalam pengamanan hutan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan pesan yang tegas bagi semua orang yang ingin melakukan pelanggaran bidang kehutanan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Masih terjadinya gangguan keamanan di Provinsi Kalsel yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah operasi pengamanan hutan</p> | | |
| | | <p>Jumlah SDM yang mengikuti diklat PPNS</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Tindak lanjut hasil pengamanan hutan berupa tangkapan dan barang bukti memerlukan peran PPNS untuk menyelesaikan tindakan hukum yang perlu diambil sebagai langkah lebih lanjut pengamanan hutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan masih kekurangan tenaga PPNS, hanya ada dua orang PNS yang berstatus PPNS.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah SDM yang mengikuti diklat PPNS</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah Polhut dan Pembina yang mengikuti pelatihan menembak guna mendukung pengamanan hutan</p> <p>Jumlah izin Pengpin yang dibuat untuk mendukung pengamanan hutan</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Tenaga pengamanan hutan Polhut perlu senantiasa untuk dilatih keterampilan menembaknya guna menghindari kejadian fatal yang disebabkan ketidakmampuan menggunakan senjata api.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya pelatihan menembak, selain kemampuan menembak Polhut yang terasah juga dapat diketahui kondisi kejiwaan dari seorang Polhut melalui test psycotes yang dilakukan pada saat pelatihan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah Polhut dan Pembina yang mengikuti pelatihan menembak</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Penggunaan senjata api dalam pengamanan hutan oleh Polhut haruslah memiliki izin Pengpin yang dikeluarkan oleh kepolisian.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya izin Pengpin senjata api, maka penggunaan senjata api dalam setiap operasi pengamanan hutan memiliki legalitas yang dilindungi oleh hukum.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah izin Pengpin yang dibuat</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Jumlah Polhut yg mengikuti kesamaptaan guna kesiapan fisik dan mental untuk pengamanan hutan</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Kondisi fisik dan mental yang mantap sangat diperlukan dalam kegiatan pengamanan hutan, karena rintangan yang mesti dihadapi cukup berat seperti faktor alam yang ekstrem dan faktor pelaku kejahatan yang tidak dapat diprediksi sikapnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya kesamaptaan bagi anggota Polhut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM nya baik secara fisik ataupun secara mental.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah Polhut yg mengikuti kesamaptaan</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasi Pengamanan Hutan,


PANTJA SATATA, S.Hut
NIP. 19700925 199403 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset | Jumlah laporan prognosis keuangan Jumlah laporan keuangan SKPD Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan | <p><u>Makna Indikator :</u> SOPD di awal tahun kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan tahun sebelumnya, berkewajiban untuk membuat pelaporan atas hasil pelaksanaan pengeluaran selama satu tahun. Selain itu SOPD juga membuat laporan keuangan per semester pada tahun berjalan sebagai evaluasi penyerapan anggaran.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan terselesaikannya dokumen pelaporan keuangan diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pencapaian realisasi keuangan serta administrasinya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan tidak dapat terlepas dari tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.</p> | Kasubbag Keuangan dan Aset | Kasubbag Keuangan dan Aset |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan tertibnya administrasi keuangan setiap bulan, dapat diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasubbag Keuangan dan Aset,



MUNANDAR, SE, MP
NIP. 19620822 198603 1 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan perencanaan dan pelaporan kinerja dan kegiatan | <p>Jumlah laporan tahunan Tahun 2016 Jumlah laporan akuntabilitas Tahun 2016 Jumlah laporan LKPJ dan LPPD Tahun 2016 Jumlah Dokumen statistik kehutanan Tahun 2016 Jumlah peserta Rakorenbanghut Prov Kalsel Tahun 2017</p> <p>Jumlah Dokumen Renja Tahun 2018 Jumlah Dokumen Review Renstra 2016-2021 Jumlah Dokumen RKA-KL Tahun 2018</p> | <p><u>Makna Indikator</u> : SOPD di awal tahun kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, berkewajiban untuk membuat pelaporan atas hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama satu tahun serta capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan sebelumnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan</u> : Dengan terselesaikannya dokumen pelaporan diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang telah tercapai dan tidak tercapai serta permasalahan-permasalahan yang terjadi.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Jumlah dokumen pelaporan yang disusun</p> <p><u>Makna Indikator</u> : SOPD wajib melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sebagai pondasi pelaksanaan kegiatan.</p> | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Jumlah Dokumen RKA SKPD Tahun 2018</p> <p>Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan kehutanan Tahun 2018</p> <p>Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat pengembangan Website</p> | <p>Dokumen perencanaan terdiri dari dua hal, yakni pertama dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang berisi rencana kegiatan beserta anggaran penunjangnya dan kedua dokumen perencanaan kinerja yang berisi janji-janji kinerja yang ingin dilaksanakan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan perencanaan yang disusun dengan benar dan menyentuh segala aspek yang diperlukan akan menghasilkan suatu perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik merupakan setengah jalan menuju keberhasilan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah rencana dokumen yang disusun x 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Seluruh SKPD dituntut untuk memenuhi kewajiban atas keterbukaan informasi kepada publik yang salah satu mediana adalah Website, saat ini Dinas Kehutanan telah memiliki Website resmi yang dijadikan sarana untuk memberikan informasi pembangunan kehutanan di Provinsi Kalsel kepada masyarakat luas.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Perlunya pengelolaan secara serius</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | atas Website yang ada dengan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan website. <u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat | | |
|--|--|--|--|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,


SYAHRIL JAYANSYAH, S. Hut
NIP. 19711231 200604 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESS IV TAHUN 2017
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian dan rumah tangga kantor | <p>Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</p> <p>Jumlah bulan penyediaan BBM</p> <p>Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum</p> <p>Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</p> <p>Jumlah pengadaan peralatan gedung</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Pelayanan keperluan rumah tangga kantor Dinas Kehutanan mutlak diperlukan sebagai pendukung kerja dan kinerja pegawai.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pelayanan keperluan rumah tangga kantor diperlukan agar tertib dan terpenuhinya semua hal-hal yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah bulan pelayanan</p> | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Jumlah lokasi yang dibina pejabat fungsionalnya Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepegawaian Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat pengembangan SAKIP</p> | <p><u>Makna Indikator :</u> Pelayanan kepegawaian dan peningkatan SDM adalah merupakan hal yang penting sebagai jalan meningkatkan kinerja pegawai.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan SDM dapat membantu meringankan urusan para pegawai serta meningkatkan kinerja para pegawai.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah lokasi yang dibina pejabat fungsionalnya Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepegawaian Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat pengembangan SAKIP</p> | | |
|--|--|---|---|--|--|

Banjarbaru, Maret 2017

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ISNANIAH S. S. Hut', written over a horizontal line.

Hj. ISNANIAH S. S. Hut, MP
NIP. 19670821 199403 2 008